

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara PDRB, jumlah penduduk, investasi, serta belanja modal dengan penerimaan pajak daerah pada tingkat kabupaten/kota di Bali pada kurun waktu 2011 hingga 2024. Model yang digunakan yaitu *Random Effect – Instrumental Variable (RE-IV)*, dengan metode *Two Stage Least Squares (2SLS)* dalam kerangka regresi data panel.

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di Bali selama 2011-2024. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB di suatu wilayah secara langsung berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak daerah di wilayah tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa kapasitas fiskal daerah di Bali sangat ditentukan oleh perkembangan aktivitas ekonomi riil, terutama pada sektor jasa dan pariwisata yang menjadi penopang utama ekonomi sekaligus sumber utama pajak daerah.
2. Variabel jumlah penduduk juga terbukti memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah selama periode penelitian. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan populasi selaras dengan kenaikan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2011-2024.
3. Variabel investasi terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Bali dalam periode 2011-2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai investasi yang terjadi belum diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak daerah, demikian pula sebaliknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi yang masuk ke Bali belum sepenuhnya memberikan kontribusi fiskal secara langsung dalam aktivitas

ekonomi lokal, atau masih berada pada tahap perkembangan yang belum menghasilkan output ekonomi yang dapat dipajaki secara langsung.

4. Variabel belanja modal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kenaikan alokasi belanja modal pemerintah daerah cenderung diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak. Secara konseptual, belanja modal berperan sebagai sarana pendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang menunjang aktivitas ekonomi. Walaupun kontribusinya tidak sebesar PDRB, belanja modal tetap memiliki peran strategis dalam memperluas basis pajak daerah.

Secara keseluruhan, di antara semua variabel yang dianalisis, PDRB menjadi faktor paling dominan dalam mendorong penerimaan pajak daerah. PDRB berperan melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, di mana variabel ini memperluas basis pajak daerah secara langsung dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien elastisitas PDRB yang paling besar dibandingkan variabel lainnya. Selanjutnya, variabel jumlah penduduk dan belanja modal juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, namun tidak sekuat variabel dominan. Adapun variabel investasi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan, sehingga belum memberikan dampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

## **5.2 Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

### **1. Saran Kebijakan**

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi regional sebagai strategi utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Arah kebijakan pembangunan ekonomi sebaiknya difokuskan pada penguatan sektor-sektor unggulan daerah, terutama sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang selama ini menjadi sumber utama penerimaan pajak daerah di Bali. Selain itu, efektivitas belanja modal perlu ditingkatkan dengan mengarahkan alokasinya pada pembangunan infrastruktur yang

secara langsung mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak daerah. Sejalan dengan belum signifikannya dampak investasi terhadap penerimaan pajak daerah, kebijakan penanaman modal perlu dievaluasi agar lebih terarah pada sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek pajak daerah serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pada sisi lainnya, pengelolaan potensi kependudukan juga perlu dioptimalkan melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia, perluasan peluang kerja, serta pendapatan masyarakat, sehingga pertumbuhan penduduk dapat diikuti oleh peningkatan kemampuan dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.

## 2. Saran Metodologis

Penelitian ini menggunakan indikator makroekonomi daerah yang bersifat agregat, sehingga belum mampu menggambarkan perbedaan kualitas belanja modal, karakteristik investasi, serta tingkat efektivitas pemungutan pajak antar kabupaten/kota secara lebih rinci. Selain itu, model analisis yang digunakan belum memasukkan aspek kelembagaan dan administrasi perpajakan daerah, seperti kepatuhan wajib pajak dan kualitas tata kelola fiskal, yang secara teoritis dapat mempengaruhi besaran penerimaan pajak daerah. Di samping itu, hasil penelitian ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan keterbatasan cakupan analisis dan ketersediaan data yang digunakan.

## 3. Saran Untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian di masa mendatang dapat mengembangkan ruang lingkup kajian melalui penambahan sejumlah variabel yang mencerminkan kualitas pembangunan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah, seperti tingkat urbanisasi, indeks pembangunan manusia, pengangguran, serta indikator efektivitas pemungutan pajak daerah. Lebih lanjut, penelitian berikutnya dapat mengembangkan pendekatan analisis melalui model spasial atau pemisahan wilayah antara kabupaten dan kota, sehingga perbedaan karakteristik ekonomi dan fiskal antarwilayah di Provinsi Bali dapat dianalisis secara lebih mendalam.